



LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Triwulan I (Per 31 Maret 2025) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor tentang Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang dan Surat Edaran Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Nomor tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi DPA yang berisi pelaksanaan dan penyerapan anggaran di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode Triwulan I Tahun 2025. Dengan adanya laporan evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan nilai presentase realisasinya dibandingkan dengan nominal anggaran tahun berjalan. Selain itu, adanya laporan evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil pada evaluasi Renja di periode laporan berikutnya.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

Ketapang, 30 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang,



Drs. MARWANNOR, MM

NIP. 19670724 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah.....	5
1.5. Sistematika.....	6
BAB II MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN.....	7
2.1. Tujuan dan Sasaran Renja	7
2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.....	9
BAB III CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Capaian Kinerja Sasaran	28
3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran	30
3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran	32
3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran	35
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	40
4.1. Faktor Pendorong	40
4.2. Faktor Penghambat.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	41
5.1. Kesimpulan.....	41
5.2. Rekomendasi Tindak lanjut.....	41
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	5
Tabel 2. 1 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang	8
Tabel 2. 2 Konsistensi Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA	10
Tabel 2. 3 Konsistensi Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA	16
Tabel 2. 4 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA	27
Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran	29
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran	31
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran.....	33
Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja dicapai, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Ketapang. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan II Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3)
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya. Sementara itu, tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2025;
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran.
- c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Metode evaluasi renja perangkat daerah meliputi teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing unit kerja di Perangkat Daerah.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi				Status
	s/d TW I	s/d TW II	s/d TW III	s/d TW IV	
1.	23 % ≤ 100 %	46 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2.	19 % ≤ 22 %	38 % ≤ 45 %	57 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3.	17 % ≤ 18 %	33% ≤ 37 %	50 % ≤ 56%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4.	14 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5.	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan metode evaluasi renja perangkat daerah, dan sistematika.

Bab II Muatan Renja dan Konsistensi Antar Dokumen.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran renja, konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bab III Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja sub kegiatan, dan penyerapan anggaran.

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Bab ini berisi tentang faktor pendorong yang mendorong tercapainya suatu target, dan faktor penghambat yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.

BAB II

MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah Meningkatkan Realisasi Investasi (PMA / PMDN)

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
- b. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan
- c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
	Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal (PMA / PMDN)	Persen	3,45
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Angka	96
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB	Angka	27.5

2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak optimal dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan indikatif pada Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra tahun 2021-2026, RKPD 2025, dan DPA tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Konsistensi Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Keterangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PALAYANAN DASAR	√	√	√	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	√	√	√	
2.18.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	√	√	√	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	√	

2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	√	√	√	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	√	√	√	
2.18.01.2.02.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	√	√	√	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	√	√	√	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√	√	√	
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	√	√	√	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	

2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	√	√	√	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	√	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√	

2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√	
2.18.02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	√	√	√	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	√	√	√	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	√	√	√	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	x	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023.
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	√	√	√	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.03	PROMOSI PENANAMAN MODAL	√	√	√	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	

2.18.02.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.04	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	√	√	√	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegritas Secara Elektronik	√	X	X	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	√	X	X	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	√	X	X	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	√	√	√	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023.
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023.
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023.

2.18.05	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	√	√	√	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	√	X	X	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	√	X	X	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	√	X	X	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.06	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	√	√	√	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	

X

2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	√	X	X	
2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023

Keterangan: √ = Konsisten; X = Tidak konsisten

Tabel 2. 3 Konsistensi Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja)	Indikator	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Keterangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PALAYANAN DASAR					
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	√	√	√	

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-				
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-				
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.	√	√	√	

2.18.01.2.02.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	√	√	√	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	√	√	√	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√	√	√	
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	√	√	√	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	√	√	√	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	√	√	√	

2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	√	√	√	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.	√	√	√	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	√	√	√	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	√	√	√	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disedikan.	√	√	√	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	√	√	√	

2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	√	√	√	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	√	√	√	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan.	√	√	√	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	√	√	√	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	√	√	√	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas	√	√	√	

	dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	√	√	√	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	√	√	√	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	√	√	√	
2.18.02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Propinsi dalam pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	√	√	√	

2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA / PMDN) dengan UMKM di Daerah	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota					
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.03	PROMOSI PENANAMAN MODAL					
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	√	√	√	
2.18.02.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi	√	√	√	

	Kewenangan Kabupaten / Kota	Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota				
2.18.04	PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi	Jumlah Pelaku Usaha yang	X	√	√	Perubahan

	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik				Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten / kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha.	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.05	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha.	X	√	√	Perubahan Nomenklatur sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
2.18.06	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	X	√	√	Perubahan Nomenklatur

	Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, di kaji dan dimanfaatkan.				sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 tahun 2023
--	---	--	--	--	--	---

Keterangan: √ = Konsisten; X = Tidak konsisten

Tabel 2. 4 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2024	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Keterangan
1	Jumlah Program	6	6	6	6	
2	Jumlah Kegiatan	13	13	13	13	
3	Jumlah Sub Kegiatan	40	40	40	40	

BAB III

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disertai dengan predikat kinerja dengan skala Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Adapun analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta penyerapan anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran merupakan analisis terhadap realisasi target kinerja IKU Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja berdasarkan Renstra PD. Adapun hasil analisisnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori Kinerja (Status)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan Realisasi Investasi PMDN / PMA	1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	%	3,45	-	-	-	Data tersedia pada bulan akhir 2025 (desember)
		2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Perizinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Angka	96	-	-	-	
		3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat daerah	3. Nilai RB DPMPTSP	Angka	27,5	-	-	-	

Sasaran Renja PD yang sesuai dengan Renstra terdiri dari (tiga) 3 sasaran. Adapun realisasi target sasaran tersebut belum dapat dianalisis disebabkan oleh data kinerja baru tersedia pada akhir tahun.

3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran

Capaian kinerja program dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target program dan tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan dokumen Renja PD tahun 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Program Renja PD terdiri dari 6 (Enam). Program pertama, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar dengan predikat kinerja.... sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar... Kondisi ini terjadi disebabkan oleh... Program kedua.... Adapun rata-rata capaian kinerja program, yaitu....

3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran


Capaian kinerja kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD tahun 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Th 2025 (%)	Penjelasan	Status Kinerja Renja 2025 (SR, R, S, T, ST)	Status Kinerja Renstra s/d 2025 (SR, R, S, T, ST)						
							I		II									III		IV			
							K	Rp (000)	K	Rp (000)								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG PENANAMAN MODAL																							
1	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA						1.203.145,17					1.203.145,17	0,00%	0,00%									
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	389.000,00	100	106.000,00	100	69.818,80	-	3.975,00	-	-	3.975,00	0,00%	5,69%	50	109.975	50,00%	28,27%	SR	SR	SR	SR
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	100	22.094.000,00	100	4.616.000,00	100	4.805.550,70	100,00	844.907,93	-	-	844.907,93	50,00%	17,58%	75	5.460.908	75,00%	24,72%	ST	T	T	SR
1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	697.000,00	100	86.060,00	100	90.173,40	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50	86.060	50,00%	12,35%	SR	SR	SR	SR
1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.755.000,00	100	750.705,72	100	426.485,88	31,25	78.872,40	-	-	78.872,40	31,25%	18,49%	66	829.578	65,63%	47,27%	ST	T	T	SR
1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	2.180.000,00	100	498.416,28	100	400.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50	498.416	50,00%	22,86%	SR	SR	SR	SR
1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.195.000,00	100	601.918,00	100	638.433,74	130.881,04	-	-	130.881,04	0,00%	20,50%	50	732.799	50,00%	33,38%	SR	T	SR	SR	
1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	891.900,00	100	916.100,00	100	489.000,00	20.970,00	-	-	20.970,00	0,00%	4,29%	50	937.070	50,00%	105,06%	SR	SR	SR	ST	
1.2.1	Pemetaan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal	100	650.580,81	100	139.000,00	100	88.632,90	7.088,40	-	-	7.088,40	0,00%	8,00%	50	146.088	50,00%	22,46%	SR	SR	SR	SR	
1.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	100	1.090.000,00	100	358.166,00	100	148.695,70	11.225,00	-	-	11.225,00	0,00%	7,55%	50	369.391	50,00%	33,89%	SR	SR	SR	SR	
1.3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100	6.285.430,69	100	3.692.064,15	100	881.277,53	13.257,50	-	-	13.257,50	0,00%	1,50%	50	3.705.322	50,00%	58,95%	SR	SR	SR	R	
1.4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu	100	3.988.831,02	100	660.000,00	100	640.812,67	56.940,90	-	-	56.940,90	0,00%	8,89%	50	716.941	50,00%	17,97%	SR	SR	SR	SR	
1.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	2.175.726,01	100	686.106,00	100	379.445,11	13.155,00	-	-	13.155,00	0,00%	3,47%	50	699.261	50,00%	32,14%	SR	SR	SR	SR	
1.6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100	725.242,00	100	140.000,00	100	127.021,90	21.872,00	-	-	21.872,00	0,00%	17,22%	50	161.872	50,00%	22,32%	SR	T	SR	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja KEGIATAN (%)											20,31%	10,44%		60,16%	28,15%	T	SR	R	SR				
Predikat Kinerja KEGIATAN											T	SR		R	SR	ST	ST	ST	ST				
Rata-rata Capaian Kinerja KESELURUHAN											7,83%	#DIV/0!		39,19%	34,82%	SR	#DIV/0!	SR	SR				
Predikat Kinerja KESELURUHAN											SR	#DIV/0!		SR	SR	ST	#DIV/0!	ST	ST				

Tidak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *)

*) Disi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun di:
 Kelapang, April 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kabupaten Kelapang

 Dr. MARWANOR M
 Pembina Utama Muda
 Np. 19670427 200003 1003

Dievaluasi di:
 Kelapang, 2025
 Kepala Bappeda
 Kabupaten Kelapang

Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)

Kegiatan Renja PD terdiri dari 13 (Tiga Belas). Kegiatan pertama, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar.... dengan predikat kinerja.... Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar... Kondisi ini terjadi disebabkan oleh... Kegiatan kedua....Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan, yaitu....

3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja sub kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target sub kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD tahun 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	5	100.000,00	1	165.954,00	1	12.124,54	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	165.954	20,00%	165,95%		SR	SR	SR	ST
1.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		SR	SR	SR	SR
1.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	900.000,00	1	350.000,00	1	200.000,00	1,00	58.872,40	-	-	-	-	-	0,00%	29,44%	1	408.872	20,00%	45,43%		SR	ST	SR	SR
1.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		SR	SR	SR	SR
1.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	30.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-	200.000	0,00%	666,67%		SR	#DIV/0!	SR	ST
1.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	950.000,00	184.635,08	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	184.635	0,00%	19,44%		SR	SR	SR	SR
1.1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	250.000,00	113.781,20	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	113.781	0,00%	45,51%		SR	SR	SR	SR
1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	25.000,00	1	3.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	3.000	20,00%	12,00%		SR	SR	SR	SR
1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	640.000,00	1	258.158,00	1	312.633,74	-	49.281,04	-	-	-	-	-	0,00%	15,76%	1	307.439	20,00%	48,04%		SR	R	SR	SR
1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.530.000,00	1	340.760,00	1	320.800,00	-	81.600,00	-	-	-	-	-	0,00%	25,44%	1	422.360	20,00%	27,61%		SR	ST	SR	SR
1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	240.000,00	150.000,00	100.000,00	-	-	-	20.970,00	-	-	-	-	-	0,00%	20,97%	-	170.970	0,00%	71,24%		SR	T	SR	T
1.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	26.900,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	4.000	0,00%	14,87%		SR	SR	SR	SR
1.1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	500.000,00	728.100,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	728.100	0,00%	145,62%		SR	SR	SR	ST
1.1.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	25	75.000,00	15.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	15.000	0,00%	20,00%		SR	SR	SR	SR
1.1.7.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12	50.000,00	19.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	19.000	0,00%	38,00%		SR	SR	SR	SR
1.2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pembebanan Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	329.414,08	39.000,00	42.809,13	-	-	-	7.088,40	-	-	-	-	-	0,00%	16,56%	-	46.088	0,00%	13,99%		SR	T	SR	SR
1.2.1.2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten / Kota	50	321.166,73	100.000,00	45.823,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	100.000	0,00%	31,14%		SR	SR	SR	SR
1.2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	5	520.000,00	128.166,00	83.016,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	128.166	0,00%	24,65%		SR	SR	SR	SR
1.2.2.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50	570.000,00	230.000,00	65.678,90	-	-	-	11.225,00	-	-	-	-	-	0,00%	17,09%	-	241.225	0,00%	42,32%		SR	T	SR	SR
1.3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	5	5.165.430,69	3.462.198,40	599.502,73	-	-	-	13.257,50	-	-	-	-	-	0,00%	2,21%	-	3.475.456	0,00%	67,28%		SR	SR	SR	T
1.3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengantar Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	5	1.120.000,00	229.865,75	281.774,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	229.866	0,00%	20,52%		SR	SR	SR	SR
1.4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	25	190.000,00	60.000,00	109.557,80	-	-	-	3.645,00	-	-	-	-	0	0,00%	3,33%	-	63.645	0,00%	33,50%		SR	SR	SR	SR
1.4.1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	5000	1.773.031,02	180.000,00	211.718,47	-	-	-	29.850,90	-	-	-	-	-	0,00%	14,10%	-	209.851	0,00%	11,84%		SR	R	SR	SR

1.5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	25	520.726,01	132.416,00	82.409,11	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	132.416	0,00%	25,43%	SR	SR	SR	SR
1.5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250	825.000,00	328.859,00	147.926,00	5.100,00	-	-	-	-	5.100,00	0,00%	3,45%	-	333.959	0,00%	40,48%	SR	SR	SR	SR	
1.5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	830.000,00	224.831,00	149.110,00	8.055,00	-	-	-	-	8.055,00	0,00%	5,40%	-	232.886	0,00%	28,06%	SR	SR	SR	SR	
1.6.1.1	Pengembangan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dibeli, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	725.242,00	140.000,00	127.021,90	21.872,00	-	-	-	-	21.872,00	0,00%	17,22%	-	161.872	0,00%	22,32%	SR	T	SR	SR	
													Rata-rata Capaian Kinerja SUBKEGIATAN (%)	3,19%	#DIV/0!	8,67%	44,69%	SR	#DIV/0!	SR	SR		
													Predikat Kinerja SUBKEGIATAN	SR	#DIV/0!	SR	SR	ST	#DIV/0!	ST	ST		
													Rata-rata Capaian Kinerja KESELURUHAN	7,83%	#DIV/0!	39,19%	34,82%	SR	#DIV/0!	SR	SR		
													Predikat Kinerja KESELURUHAN	SR	#DIV/0!	SR	SR	ST	#DIV/0!	ST	ST		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :*)																							

*) Diki oleh Kepala BAPPEDA

Disusun di:

Ketapang, April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PT SP
Kabupaten ketapang



Dr. MARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19670427 200003 1 003

Dievaluasi di:

Ketapang, 2025
Kepala Bappeda
Kabupaten Ketapang

Petunjuk Pengisian Formulir E&I:

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)

Sub kegiatan Renja PD terdiri dari 47 (Empat Puluh Tujuh). Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Renja, yaitu sebesar... dengan predikat kinerja... Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar... Adapun sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja baik, yaitu sebanyak.... Sedangkan sub kegiatan yang kinerjanya belum optimal, yaitu sebanyak...

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja merupakan analisis terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta penyerapan anggaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan II Tahun 2024 di atas, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, sebagai berikut:

4.1. Faktor Pendorong

- a. Adanya Regulasi yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha sebagai pedoman dalam melaksanakan pendampingan pelayanan perizinan di daerah (Perpres, Permen, Perda dan Perbup);
- b. Pelayanan Perizinan sudah melalui Sistem / Aplikasi (OSS), SIMBG dan si *Cantik*;
- c. Adanya Koordinasi antar OPD dan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- d. Penyampaian Promosi potensi investasi daerah untuk para investor berupa kajian potensi dan pemetaan potensi, sebaran dan daya saing;
- e. SDM yang Kompeten (telah mengikuti Bimtek dan bersertifikat serta mempunyai jenjang Pendidikan rata-rata S1).

4.2. Faktor Penghambat

- a. Fasilitas Internet yang belum Maksimal di beberapa Kecamatan;
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pendampingan pelayanan perizinan berusaha;
- c. Pelaku Usaha dan UMKM banyak yang belum mengenal Izin Usha secara Elektronik;
- d. Belum Sinkronnya regulasi yang dikeluarkan Pusat dengan regulasi yang ada di Daerah terkait masih belum sepenuhnya system dan tumpang tindih kewenangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a.
- b.
- c.
- d.

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun rekomendasi yang dirumuskan dan perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja PD, yaitu sebagai berikut

- a.
- b.
- c.
- d.

LAMPIRAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Th 2025 (%)		Penjelasan	Status Kinerja Renja 2025 (SR, R, S, T, ST)		Status Kinerja Renstra s/d 2025 (SR, R, S, T, ST)			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	I	II	III	IV	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12a=8+9+10+11	12b=12a/7 X 100%	13=6+12a	14=13/5 X 100%	16	17	18											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
BIDANG PENANAMAN MODAL																												
1	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA																											
1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	30.201.900,00	85	7.575.200,00	85	6.919.462,52	-	1.079.606,37	-	-	-	-	1.079.606,37	0,00%	15,60%	43	8.654.806	42,50%	28,66%						
1.1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	389.000,00	100	106.000,00	100	69.818,80	-	3.975,00	-	-	-	-	3.975,00	0,00%	5,69%	50	109.975	50,00%	28,27%						
1.1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	42.000,00	6	8.000,00	6	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	8.000	20,00%	19,05%						
1.1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	16.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		3.000	0,00%	18,75%						
1.1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%						
1.1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	16.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		3.000	0,00%	18,75%						
1.1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	11.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		2.000	0,00%	18,18%						
1.1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	130.000,00	6	25.000,00	6	23.016,80	2.625,00	-	-	-	-	2.625,00	0,00%	11,40%		27.625	0,00%	21,25%							
1.1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	174.000,00	4	65.000,00	4	30.802,00	1.350,00	-	-	-	-	1.350,00	0,00%	4,38%		66.350	0,00%	38,13%							
1.1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	100	22.094.000,00	100	4.616.000,00	100	4.805.550,70	100,00	844.907,93	-	-	-	50,00	844.907,93	50,00%	17,58%	75	5.460.908	75,00%	24,72%						
1.1.2.1		Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	22.010.000,00	35	4.600.000,00	35	4.788.550,70	35	844.907,93	-	-	-	35	844.907,93	100,00%	17,64%	70	5.444.908	200,00%	24,74%						
1.1.2.2		Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%						
1.1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	42.000,00	1	8.000,00	1	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	8.000	20,00%	19,05%						
1.1.2.4		Pengebban dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%						
1.1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	5	42.000,00	1	8.000,00	1	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	8.000	20,00%	19,05%						
1.1.2.6		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%						

1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	697.000,00	100	86.060,00	100	90.173,40	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50	86.060	50,00%	12,35%		SR	SR	SR	SR	
1.1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipkln Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipkln Pegawai	2	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	45.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	50.000	0,00%	111,11%		SR	SR	SR	ST	
1.1.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	25.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	5.000	20,00%	20,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10	400.000,00	-	-	-	40.400,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15	220.000,00	2	31.060,00	2	44.773,40	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	31.060	13,33%	14,12%		SR	SR	SR	SR	
1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.755.000,00	100	750.705,72	100	426.485,88	31,25	78.872,40	-	-	-	31,25	78.872,40	31,25%	18,49%	66	829.578	65,63%	47,27%		ST	T	T	SR
1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	35.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	15.000	4,00%	42,86%		SR	SR	SR	SR	
1.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	720.000,00	1	219.751,72	1	199.361,34	0,25	20.000,00	0,25	-	-	0,50	20.000,00	50,00%	10,03%	2	239.752	10,00%	33,30%		ST	SR	SR	SR
1.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5	100.000,00	1	165.954,00	1	12.124,54	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	165.954	20,00%	165,95%		SR	SR	SR	ST	
1.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	900.000,00	1	350.000,00	1	200.000,00	1,00	58.872,40	-	-	-	-	58.872,40	0,00%	29,44%	1	408.872	20,00%	45,43%		SR	ST	SR	SR
1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	2.180.000,00	100	498.416,28	100	400.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50	498.416	50,00%	22,86%		SR	SR	SR	SR	
1.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	30.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-	200.000	0,00%	666,67%		SR	#DIV/0!	SR	ST	
1.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	950.000,00	-	184.635,08	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	184.635	0,00%	19,44%		SR	SR	SR	SR	
1.1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	250.000,00	-	113.781,20	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	113.781	0,00%	45,51%		SR	SR	SR	SR	
1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.195.000,00	100	601.918,00	100	638.433,74	-	130.881,04	-	-	-	-	130.881,04	0,00%	20,50%	50	732.799	50,00%	33,38%		SR	T	SR	SR
1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	25.000,00	1	3.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	3.000	20,00%	12,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	640.000,00	1	258.158,00	1	312.633,74	-	49.281,04	-	-	-	-	49.281,04	0,00%	15,76%	1	307.439	20,00%	48,04%		SR	R	SR	SR
1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.530.000,00	1	340.760,00	1	320.800,00	-	81.600,00	-	-	-	-	81.600,00	0,00%	25,44%	1	422.360	20,00%	27,61%		SR	ST	SR	SR
1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	891.900,00	100	916.100,00	100	489.000,00	-	20.970,00	-	-	-	-	20.970,00	0,00%	4,29%	50	937.070	50,00%	105,06%		SR	SR	SR	ST
1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	240.000,00	-	150.000,00	-	100.000,00	-	20.970,00	-	-	-	-	20.970,00	0,00%	20,97%	-	170.970	0,00%	71,24%		SR	T	SR	T
1.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perincian Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perincian	14	26.900,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	4.000	0,00%	14,87%		SR	SR	SR	SR	
1.1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	500.000,00	-	728.100,00	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	728.100	0,00%	145,62%		SR	SR	SR	ST	
1.1.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	25	75.000,00	-	15.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	15.000	0,00%	20,00%		SR	SR	SR	SR	
1.1.7.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12	50.000,00	-	19.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	19.000	0,00%	38,00%		SR	SR	SR	SR	

1.2		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan	100	1.740.580,81	100	497.166,00	100	237.328,60	18.313,40	-	-	-	18.313,40	0,00%	7,72%	50	515.479	50,00%	29,62%	SR	SR	SR	SR
1.2.1		Pemberian Pembebasan Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal	100	650.580,81	100	139.000,00	100	88.632,90	7.088,40	-	-	-	7.088,40	0,00%	8,00%	50	146.088	50,00%	22,46%	SR	SR	SR	SR
1.2.1.1		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pembebasan Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	329.414,08		39.000,00		42.809,13	7.088,40	-	-	-	7.088,40	0,00%	16,56%	-	46.088	0,00%	13,99%	SR	T	SR	SR
1.2.1.2		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan usaha dari pebaku usaha yang memperoleh fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten / Kota	50	321.166,73		100.000,00		45.823,77	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	100.000	0,00%	31,14%	SR	SR	SR	SR
1.2.2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	100	1.090.000,00	100	358.166,00	100	148.695,70	11.225,00	-	-	-	11.225,00	0,00%	7,55%	50	369.391	50,00%	33,89%	SR	SR	SR	SR
1.2.2.1		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Penda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	5	520.000,00		128.166,00		83.016,80	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	128.166	0,00%	24,65%	SR	SR	SR	SR
1.2.2.2		Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50	570.000,00		230.000,00		65.678,90	11.225,00	-	-	-	11.225,00	0,00%	17,09%	-	241.225	0,00%	42,32%	SR	T	SR	SR
1.3		PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah	100	6.285.430,69	100	3.692.064,15	100	881.277,53	13.257,50	-	-	-	13.257,50	0,00%	1,50%	50	3.705.322	50,00%	58,95%	SR	SR	SR	R
1.3.1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100	6.285.430,69	100	3.692.064,15	100	881.277,53	13.257,50	-	-	-	13.257,50	0,00%	1,50%	50	3.705.322	50,00%	58,95%	SR	SR	SR	R
1.3.1.1		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	5	5.165.430,69		3.462.198,40		599.502,73	13.257,50	-	-	-	13.257,50	0,00%	2,21%	-	3.475.456	0,00%	67,28%	SR	SR	SR	T
1.3.1.2		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	5	1.120.000,00		229.865,75		281.774,80	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	229.866	0,00%	20,52%	SR	SR	SR	SR
1.4		PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan Pelayanan Penanaman Modal	100	3.988.831,02	100	660.000,00	100	640.812,67	56.940,90	-	-	-	56.940,90	0,00%	8,89%	50	716.941	50,00%	17,97%	SR	SR	SR	SR
1.4.1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu	100	3.988.831,02	100	660.000,00	100	640.812,67	56.940,90	-	-	-	56.940,90	0,00%	8,89%	50	716.941	50,00%	17,97%	SR	SR	SR	SR
1.4.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pebaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten kota	25	190.000,00	0	60.000,00	0	109.557,80	3.645,00	-	-	0	3.645,00	0,00%	3,33%	-	63.645	0,00%	33,50%	SR	SR	SR	SR
1.4.1.2		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pebaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	5000	1.773.031,02		180.000,00		211.718,47	29.850,90	-	-	-	29.850,90	0,00%	14,10%	-	209.851	0,00%	11,84%	SR	R	SR	SR
		Penyediaan dan Pengabdian Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pebaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	795.800,00	0	170.000,00	0	110.116,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	170.000	0,00%	21,36%	SR	SR	SR	SR
		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas daerah	50	1.230.000,00		250.000,00		209.420,40	23.445,00	-	-	-	23.445,00	0,00%	11,20%	-	273.445	0,00%	22,23%	SR	SR	SR	SR
1.5		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel	100	2.175.726,01	100	686.106,00	100	379.445,11	13.155,00	-	-	-	13.155,00	0,00%	3,47%	50	699.261	50,00%	32,14%	SR	SR	SR	SR
			2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala			100	100				-	-	-											

1.5.1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	2.175.726,01	100	686.106,00	100	379.445,11		13.155,00			-		-		-		13.155,00	0,00%	3,47%	50	699.261	50,00%	32,14%		SR	SR	SR	SR																		
1.5.1.1		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	25	520.726,01		132.416,00		82.409,11		-			-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	132.416	0,00%	25,43%		SR	SR	SR	SR																		
1.5.1.2		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250	825.000,00		328.859,00		147.926,00		5.100,00			-		-		-		5.100,00	0,00%	3,45%	-	333.959	0,00%	40,48%		SR	SR	SR	SR																		
1.5.1.3		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	830.000,00		224.831,00		149.110,00		8.055,00			-		-		-		8.055,00	0,00%	5,40%	-	232.886	0,00%	28,06%		SR	SR	SR	SR																		
1.6		PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	725.242,00	100	140.000,00	100	127.021,90		21.872,00			-		-		-		21.872,00	0,00%	17,22%	50	161.872	50,00%	22,32%		SR	T	SR	SR																		
1.6.1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100	725.242,00	100	140.000,00	100	127.021,90		21.872,00			-		-		-		21.872,00	0,00%	17,22%	50	161.872	50,00%	22,32%		SR	T	SR	SR																		
1.6.1.1		Pengembangan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dibah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	725.242,00		140.000,00		127.021,90		21.872,00			-		-		-		21.872,00	0,00%	17,22%	-	161.872	0,00%	22,32%		SR	T	SR	SR																		
																				Rata-rata Capaian Kinerja PROGRAM (%)	0,00%	9,07%		48,75%	31,61%		SR	SR	SR	SR																			
																				Predikat Kinerja PROGRAM	SR	SR		ST	ST		ST	ST	ST	ST																			
																				Rata-rata Capaian Kinerja KEGIATAN (%)	20,31%	10,44%		60,16%	28,15%		T	SR	R	SR																			
																				Predikat Kinerja KEGIATAN	T	SR		R	SR		ST	ST	ST	ST																			
																				Rata-rata Capaian Kinerja SUBKEGIATAN (%)	3,19%	#DIV/0!		8,67%	44,69%		SR	#DIV/0!	SR	SR																			
																				Predikat Kinerja SUBKEGIATAN	SR	#DIV/0!		SR	SR		ST	#DIV/0!	ST	ST																			
																				Rata-rata Capaian Kinerja KESELURUHAN	7,83%	#DIV/0!		39,19%	34,82%		SR	#DIV/0!	SR	SR																			
																				Predikat Kinerja KESELURUHAN	SR	#DIV/0!		ST	#DIV/0!		ST	#DIV/0!	ST	ST																			
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja																				2																													
Faktor Penghambat pencapaian kinerja																																																	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Trivulan berikutnya *)																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SRPD berikutnya *)																																																	

*) Disi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun di:
Ketapang, April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Ketapang



Drs. MARWANNOOR MM
Pembina Utama Muda
Np.19670427 200003 1 003

Dievaluasi di:
Ketapang, 2025
Kepala Bappeda
Kabupaten Ketapang

Petunjuk Pengisian Formulir E.81: